

**SKRIPSI**

**RONALD BUDI LAKSMANA**

**PELAKSANAAN PUTUSAN PERDAMAIAN  
SERTA AKIBAT HUKUMNYA**



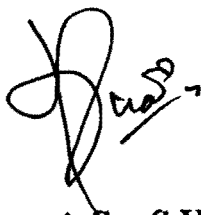
**PROGRAM EKSTENSI FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
S U R A B A Y A  
2002**

**PELAKSANAAN PUTUSAN PERDAMAIAN  
SERTA AKIBAT HUKUMNYA**

**SKRIPSI**

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN  
MEMENUHI SYARAT GUNA MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA HUKUM**

**Dosen Pembimbing,**



**Bambang Sugeng A.S., S.H., M.H.**  
**NIP. 132 049 476**

**Penyusun,**



**Ronald B. Laksmana**  
**NIM. 039810357 U**

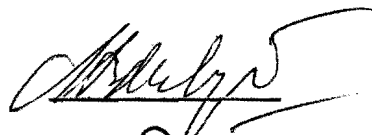
**FAKULTAS HUKUM PROGRAM EKSTENSI  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2002**

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji**

**Pada hari Senin, tanggal 7 Januari 2002**

**Panitia Penguji Skripsi :**

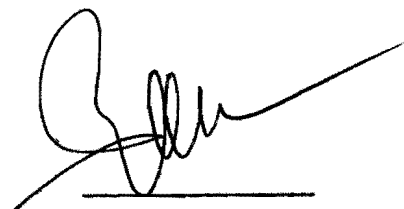
**Ketua : Dr. H. Abdoel Rasjid, S.H., LL.M.**



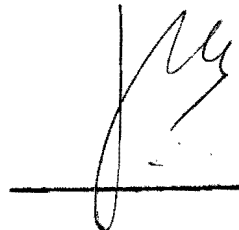
**Anggota : 1. Bambang Sugeng A.S., S.H., M.H.**



**2. H. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S.**



**3. Y. Sogar Simamora, S.H., M.Hum.**



## BAB IV

### PENUTUP

#### 1. Kesimpulan

Akta perdamaian adalah suatu bentuk persetujuan dalam secara tertulis yang dibuat oleh para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan persengketaan. Diatur dalam Pasal 1851 sampai Pasal 1864 KUHPerdara adalah akta perdamaian yang telah dikukuhkan oleh pengadilan melalui putusan hakim.

Suatu perdamaian harus memenuhi syarat-syarat tertentu yaitu persetujuan kedua belah pihak, putusan perdamaian mengakhiri sengketa, perdamaian atas sengketa yang telah ada, persetujuan perdamaian berbentuk tertulis, adanya pengorbanan para pihak yang bersengketa untuk sekedar melepaskan haknya dengan sukarela.

Perdamaian yang dibuat diluar sidang pengadilan dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu melalui notaris dan dibuat sendiri oleh pihak-pihak yang bersengketa, guna mengakhiri sengketa yang mereka hadapi, sehingga dapat dikatakan mempunyai kekuatan hukum bagi para pihak yang membuatnya saja dan pelaksanaannya tidak dapat dipaksakan, karena tidak mempunyai kekuatan eksekutorial.

Perdamaian yang dibuat didalam sidang pengadilan, jika ada salah satu pihak tidak melaksanakan isi perdamaian itu, maka pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan jalan eksekusi melalui Pengadilan Negeri terhadap harta benda yang dimaksud dalam isi perdamaian itu.

Putusan perdamaian lebih efisien apabila dibandingkan dengan putusan biasa, efisiensinya putusan perdamaian yaitu:

- perkaranya sederhana, cepat dapat diselesaikan dan biayanya ringan, sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) UU No. 14 Th. 1970;
- putusan perdamaian dapat dipaksakan pelaksanaannya oleh karena mempunyai kekuatan eksekutorial;
- putusan perdamaian tidak dapat dibanding, sesuai dengan Pasal 130 ayat (2) HIR.

Upaya yang dapat dilaksanakan atau ditempuh oleh pihak yang dirugikan didalam akta perdamaian yang tidak terlaksanakan antara lain:

- pihak yang dirugikan bisa mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri setelah jangka waktu yang diberikan dan perdamaian itu tidak dipatuhi oleh pihak yang lain;

- pihak yang merasa kuatir akan dirugikan bisa langsung mengajukan permohonan eksekusi pada saat akta perdamaian itu ditetapkan oleh pengadilan;
- pihak yang dirugikan bisa menuntut pihak yang lain sebagai tindak pidana penggelapan, jika terbukti bahwa pihak tersebut sengaja mengalihkan harta kekayaan yang menjadi obyek perdamaian tanpa setahu pihak yang dirugikan.

Upaya penyelesaian terhadap hambatan bila ada pihak yang beritikad buruk yang tidak melaksanakan isi putusan perdamaian adalah:

- minta bantuan Pengadilan Negeri untuk melakukan somasi atau teguran, bila tetap tidak dilaksanakan;
- mengajukan permohonan eksekusi pada Ketua Pengadilan Negeri, maka Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan surat perintah yang berbentuk surat penetapan yang dijalankan oleh panitera atau jurusita.

## **2. Saran-Saran**

Mengingat perdamaian harus dibuat dalam bentuk tertulis sesuai dengan ketentuan Pasal 1851 KUHP, maka para pihak yang mengadakan perdamaian harus jelas dalam membuat klausula, sehingga tidak dapat ditafsirkan lain,

agar dapat memudahkan dilaksanakan dengan itikad baik sesuai dengan itikad perdamaian.

Seyogyanya hakim tidak sekedar memeriksa akta perdamaian serta mengesahkannya menjadi putusan perdamaian akan tetapi juga senantiasa memberikan pengarahannya untuk penyempurnaan isi putusan perdamaian yang bersifat yuridis agar putusan perdamaian tidak diabaikan.

Oleh karena putusan perdamaian sama dengan putusan hakim biasa yaitu sama-sama mempunyai kekuatan eksekutorial maka pelaksanaan putusan perdamaian sebaiknya langsung dieksekusi paksa sehingga mempercepat penyelesaian masalah.